



Rencana Strategis 2015-2019 BPS Provinsi Jawa Timur

Reviu Pertama, Februari 2016



Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur



RENCANA STRATEGIS

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

2015-2019

Reviu



Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR 2015-2019

No. Publikasi : -
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : 50 hlm

Naskah
Sub Bagian Bina Program

Gambar Kulit
Ahmad Tadjeri, Staf Sub Bagian Urusan Dalam

Sumber gambar:
Diunduh dari: -

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
Februari 2016

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KUTIPAN

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2015-2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kebutuhan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam pembangunan nasional, maka Badan Pusat Statistik perlu menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun kedepan;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2015-2019**

Pasal 1

Rencana Strategis pada Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut sebagai Renstra BPS Tahun 2015-2019, memuat gambaran umum situasi perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik, serta program dan kegiatan Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

- (1) Renstra BPS Tahun 2015-2019 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 bidang statistik dan digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah bidang statistik selama kurun waktu 2015-2019.
- (2) Renstra BPS Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi instansi vertikal BPS dalam menyusun Renstra pada masing-masing instansi vertikal BPS tersebut.
- (3) Penyusunan Renstra pada instansi vertikal BPS Tahun 2015-2019 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3

Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 30 Maret 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SURYAMIN

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur telah disusun pada tahun 2015. Renstra ini akan dijadikan *benchmark* yang jelas dan terarah dalam mencapai sasaran, agenda, dan misi dalam pengembangan perstatistikan di daerah Jawa Timur.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan semua agenda dalam Renstra tersebut dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai **Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua**, maka perlu dilakukan evaluasi setiap tahun. Perubahan atau revisi muatan dalam Renstra termasuk indikator kinerjanya dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan proses bisnis.

Perubahan proses bisnis yang dianggap penting dalam pengukuran kinerja akan dijadikan indikator kinerja tambahan. Pada tahun 2016, telah dilakukan perubahan Peraturan Kepala BPS nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Adanya perubahan IKU menyebabkan dokumen Renstra harus diubah atau dilakukan reviu atas Renstra. Dasar hukum melakukan reviu Renstra adalah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik 2015-2019. Dengan demikian, dokumen Reviu Renstra ini merupakan dokumen Renstra yang telah disesuaikan dengan perubahan IKU yang terjadi.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Reviu Renstra BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran hingga terwujudnya dokumen Reviu Renstra ini. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 11 Februari 2016

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur,



Teguh Pramono, MA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik, menjadi dasar hukum bagi BPS sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Data statistik BPS dijadikan sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil capaian pembangunan. Penyediaan data statistik yang berkualitas akan sangat menentukan karena akan berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan.

Memasuki pembangunan nasional jangka menengah periode ketiga tahun 2015-2019 dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ini, BPS masih memegang posisi strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data statistik yang berkualitas, serta menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai langkah awal dalam upaya menjalankan peranannya tersebut, BPS telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan statistik selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra BPS Tahun 2015-2019 memuat visi dan misi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN.

Dalam upaya meningkatkan analisis terhadap akuntabilitas kerjanya BPS berusaha melakukan perubahan beberapa indikator kinerja. Perubahan indikator kinerja ini menyebabkan dokumen Indikator Kinerja Utama BPS (IKU) Provinsi Jawa Timur yang telah disusun pada tahun 2015 perlu direviu. Reviu terhadap IKU memiliki landasan hukum berupa Peraturan Kepala BPS RI nomor 2 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Perubahan IKU mengakibatkan perlunya reviu terhadap Renstra 2015-2019 BPS provinsi Jawa Timur yang telah disusun pada tahun 2015. Dasar hukum melakukan reviu Renstra adalah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik 2015-2019.

Perubahan dokumen Renstra tidak mengubah visi BPS sebagai **"Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua"**. Dan untuk dapat mewujudkan visi tersebut pada periode ketiga RPJMN ini, BPS tetap menyatakan 3 (tiga) pernyataan misi, yaitu sebagai berikut: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional, dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS Provinsi Jawa Timur memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis hingga tahun 2019, antara lain: (1) peningkatan kualitas data statistik; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis tersebut mencerminkan fokus BPS Provinsi Jawa Timur dalam periode Renstra 2015-2019, yakni berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari data statistik yang dihasilkan; (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada pengguna data; (3) efektifitas dalam pembinaan dan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola pemerintahan dalam organisasi BPS.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya, BPS melaksanakan serangkaian kegiatan yang diwadahi ke dalam sejumlah program yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). Sebagai instansi vertikal, BPS

Daerah akan melaksanakan tiga diantara sejumlah program BPS tersebut yaitu Program PPIS, Program DMPTTL, dan Program PSPA.

BPS Provinsi Jawa Timur merupakan instansi vertikal BPS yang melaksanakan tugas dan fungsi BPS di daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka pelaksanaan perannya tersebut, BPS Provinsi Jawa Timur senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. BPS Provinsi Jawa Timur juga menyusun Renstra tersendiri yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Jawa Timur untuk dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan perannya sebagai instansi vertikal BPS di daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Renstra BPS 2015-2019.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kondisi Umum.....	2
1.3. Potensi dan Permasalahan	4
VISI, MISI, DAN TUJUAN	8
2.1 Visi BPS Provinsi Jawa Timur.....	8
2.2 Misi BPS Provinsi Jawa Timur	8
2.3 Tujuan BPS Provinsi Jawa Timur.....	9
2.4 Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur	10
2.5 Nilai-Nilai Inti BPS.....	11
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	14
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Pusat.....	14
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Jawa Timur.....	15
3.3 Program dan Kegiatan.....	16
3.4 Kerangka Regulasi	21
3.5 Kerangka Kelembagaan.....	24
3.6 Konstruksi dan Siklus Perubahan Rencana Strategis BPS Provinsi Jawa Timur.....	25
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
4.1 Target Kinerja	29
4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	29
4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	32
4.2 Kerangka Pendanaan.....	32
PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Provinsi Jawa Timur 2015-2019	9
Tabel 2. Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur 2015-2019.....	17
Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran BPS Provinsi Jawa Timur	30
Tabel 4. Alokasi Anggaran 2015-2019 Menurut Program	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. KONSTRUKSI DAN SIKLUS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI JAWA TIMUR	26
Gambar 2. JADWAL REVIU RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI JAWA TIMUR 2015-2019	27
Gambar 3. SIKLUS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI JAWA TIMUR 2015-2019	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Provinsi Jawa Timur	35
Lampiran 2. Pendanaan Per Kegiatan	50

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Kondisi Umum

1.3 Potensi dan Permasalahan

1.1 Latar Belakang

Dua dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Renstra adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

Undang-undang tersebut mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*), penganggaran terpadu (*Unified Budgeting*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi.

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam Perpres tersebut Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Selain itu terdapat dasar hukum BPS dalam melaksanakan tugas yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Badan Pusat Statistik sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Provinsi Jawa Timur perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean government* di Indonesia.

Rencana BPS Provinsi Jawa Timur dalam melakukan tugasnya selama 5 tahun dituangkan dalam Renstra BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS Pusat tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS Pusat 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Selain itu, Renstra BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 Kondisi Umum

Capaian pembangunan nasional periode kedua dalam tahapan RPJPN 2005-2025 menunjukkan peningkatan/perbaikan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Indonesia. Capaian Pembangunan nasional ini bisa dilihat dari perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,8% pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang hanya mencapai 4,6%. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp. 9.084,0 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.499,9. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human Development Index (HDI) meningkat dari 0,726 pada tahun 2009 menjadi 0,732 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan pun mengalami penurunan dari 16,7% di tahun 2009, menjadi 11,96% di tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 8,1% di tahun 2009, menjadi 5,62 pada tahun 2013. Peningkatan capaian pembangunan nasional tersebut tidak lepas dari kontribusi capaian pembangunan dari daerah.

Pencapaian pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional menjadi modal dalam upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya yang merupakan prioritas arah pembangunan nasional periode ketiga tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional periode tersebut diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Disinilah BPS menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar yang berkualitas.

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang ditetapkan oleh BPS RI untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJMD, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Selama ini, BPS Provinsi Jawa Timur telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi diperoleh melalui Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

Lebih jauh lagi, BPS Provinsi Jawa Timur juga telah memenuhi kebutuhan pemerintah secara umum dan kebutuhan pemerintah daerah secara khusus. Selama periode 2010-2014, BPS telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, di antaranya adalah :

- Data kependudukan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010), angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin lainnya di bidang sosial, antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional dan lain lain
- Data pertanian hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST2013), data produksi padi dan palawija, data perusahaan perkebunan, data perusahaan peternakan dan rumah potong hewan dan berbagai survei atau pengumpulan data rutin lainnya di bidang Pertanian, antara lain Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian,.
- Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, industri besar/średang, nilai tukar petani, dan berbagai survei rutin lainnya di ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015, Survei Industri Makro dan Kecil Triwulan, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur juga menyediakan data atau indikator-indikator yang digunakan dalam pembangunan daerah.

1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.3.1 Potensi yang Dimiliki

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik merupakan dasar hukum yang melandasi BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar yang dibutuhkan untuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum. Selain itu, BPS juga menjalankan tugas sebagai koordinator dan pembina dalam pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Secara kelembagaan, BPS Provinsi Jawa Timur adalah salah satu instansi vertikal BPS yang merupakan bagian integral dari BPS Pusat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Perpres tersebut menjelaskan bahwa BPS Daerah (BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota) dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur senantiasa berkoordinasi dengan BPS Pusat dan BPS Kabupaten/Kota di bawahnya.

Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terdapat dua puluh sembilan wilayah kabupaten dan sembilan wilayah kota. Disinilah BPS Provinsi Jawa Timur sebagai instansi vertikal BPS dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan data statistik yang berkualitas dalam rangka membantu pembangunan di daerah. Kepercayaan pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Jawa Timur terhadap BPS Provinsi Jawa Timur masih sangat tinggi. Salah satu buktinya yaitu sebagian besar data yang digunakan dalam Database Millenium Development Goals (MDG's) Provinsi Jawa Timur yang baru diluncurkan pada tahun 2014 adalah data yang dihasilkan BPS Provinsi Jawa Timur. Memasuki era Sustainable Development Goals (SDG's) yang merupakan lanjutan dari MDG's, peran BPS semakin penting dalam menyediakan data statistik tentang pencapaian nasional maupun daerah pada sejumlah area fokus SDG's.

Beberapa potensi yang dimiliki BPS secara umum adalah sebagai berikut:

- Kemajuan Teknologi Informasi dan Komputer yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Provinsi Jawa Timur merupakan potensi untuk meningkatkan

kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.

- Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.
- Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Provinsi Jawa Timur dirasakan masih rendah, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

1.3.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi terdiri atas 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal.

a. Internal (kelemahan dari dalam organisasi)

Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Terutama minimnya SDM ahli dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan laporan pengelolaan keuangan terutama di BPS Kabupaten/Kota yang tidak kalah pentingnya dengan kinerja kegiatan teknis BPS. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini ada yang belum mempunyai perwakilan BPS. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Koordinasi yang masih relatif lemah antara unit kerja baik di lingkup BPS Provinsi Jawa Timur, antar BPS Provinsi dengan BPS

Kabupaten/Kota, maupun dengan BPS Pusat, menjadi penyebab belum optimalnya ketepatan waktu rilis data BPS.

b. Eksternal (kelemahan dari luar organisasi)

- Rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah.
- Belum optimalnya komunikasi antara BPS dengan instansi pemerintah daerah yang menyebabkan keterlambatan terkumpulnya data sekunder terkait penyusunan publikasi seperti Daerah Dalam Angka
- Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan.
- Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain :

- a. *National Statistical Offices* (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.
- b. Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.
- c. Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.
- d. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

BAB II

Visi, Misi dan Tujuan

- 2.1 Visi BPS Provinsi Jawa Timur
- 2.2 Misi BPS Provinsi Jawa Timur
- 2.3 Tujuan BPS Provinsi Jawa Timur
- 2.4 Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur
- 2.5 Nilai-Nilai Inti BPS

2.1 Visi BPS Provinsi Jawa Timur

Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka disepakati bahwa Visi BPS Provinsi Jawa Timur 2015-2019 tetap sama dengan Visi BPS Propinsi Jawa Timur 2010-2014, yaitu sebagai berikut:

"Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua".

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS Provinsi Jawa Timur sebagai penyedia data dan informasi statistik baik lingkup nasional maupun daerah menjadi semakin penting, BPS Propinsi Jawa Timur bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan karena dapat dipercaya semua pihak.

2.2 Misi BPS Provinsi Jawa Timur

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason of being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta kaitannya dalam rangka mewujudkan Visi BPS 2015-2019, ditetapkan misi BPS Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.3 Tujuan BPS Provinsi Jawa Timur

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi BPS periode 2015-2019, BPS Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan-tujuan yang telah dirumuskan BPS yaitu antara lain:

- Tujuan I Peningkatan kualitas data statistik;
- Tujuan II Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- Tujuan III Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Keberhasilan BPS Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan perannya sebagai instansi vertikal BPS di wilayah Provinsi Jawa Timur dilihat dari keberhasilan dari tujuannya. Hal ini sesuai dengan penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Untuk dapat mengukur keberhasilan tujuan BPS Daerah, BPS telah menetapkan secara spesifik indikator dari masing-masing tujuan. Keberhasilan tujuan pertama diukur dari persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan kedua diukur dari persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS. Sementara keberhasilan tujuan yang ketiga diukur dari hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat BPS RI. BPS Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target dari masing-masing indikator tujuan untuk periode 2015-2019.

Tabel 1. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Provinsi Jawa Timur 2015-2019

No	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	84%	84%	84%	84%	84%
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	84%	84%	84%	84%	84%
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	50	50	50	50	50

2.4 Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Pencapaian sasaran melalui kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Secara ringkas, sasaran strategis pembangunan statistik BPS Provinsi Jawa Timur dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas data statistik" adalah :
 - 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran :
 - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
 - 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
 - 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;
 - 1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu;
 - 1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu; dan
 - 1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu.
 - 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*), dengan indikator sasaran :
 - 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga.
 - 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha.

- 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik", adalah :
 - 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*), dengan indikator sasaran :
 - 2.1.1. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS;
 - 2.1.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional;
 - 2.1.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;
 - 2.1.4. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS;
 - 2.1.5. Persentase konsumen yang puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS; dan
 3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel", adalah :
 - 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS.
Dengan indikator sasaran :
 - 3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
 - 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I
 - 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.
Dengan indikator sasaran :
 - 3.2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat;

2.5 Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai-nilai inti adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi organisasi. Nilai-nilai inti ini memberikan batasan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh organisasi serta membentuk perilaku yang diharapkan dari setiap bagian dari organisasi dalam upaya mewujudkan visinya. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk setiap pegawai dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik:

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),
- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kompeten, mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban;
- b) Efektif, memberikan hasil maksimal;
- c) Efisien, mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal;
- d) Inovatif, selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus;
- e) Sistemik, meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. **Integritas**

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Dedikasi, memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi;
- b) Disiplin, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c) Konsisten, selarasnya kata dengan perbuatan;
- d) Terbuka, menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak;
- e) Akuntabel, bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Terpercaya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual;
- b) Jujur, melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas;
- c) Tulus, melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa;
- d) Adil, menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Pusat

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Jawa Timur

3.3 Program dan Kegiatan

3.4 Kerangka Regulasi

3.5 Kerangka Kelembagaan

3.6 Konstruksi dan Siklus Perubahan Rencana Strategis BPS Provinsi Jawa Timur

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Pusat

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Provinsi Jawa Timur mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sebagai berikut :

- a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.
- b) Peningkatan respons rate.
- c) Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat.
- e) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS.
- f) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
- g) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN.

Sedangkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;
- b) Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;
- c) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;
- d) Meningkatkan *Customer Relationship Management*;
- e) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;
- f) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- g) Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait;
- h) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS; dan
- i) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Sedangkan untuk BPS Provinsi Jawa Timur mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik, Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Provinsi Jawa Timur meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS.

Di lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur menjalankan program dua program generik yaitu DMPTTL dan PSPA. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja, target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan disajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada tabel 2. Sedangkan Tabel 3 menunjukkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2015-2019.

Tabel 2. Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur 2015-2019

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Arah Kebijakan (5)	Strategi (6)	Program (7)	Kegiatan (8)
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas data statistik Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Peningkatan birokrasi yang akuntabel 	<p>1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS,</p> <p>Indikator sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Peningkatan respons rate. Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik; Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data; Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS; Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik; Meningkatkan <i>Customer Relationship Management</i>; Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik; 	<ol style="list-style-type: none"> PPIS DMPTTL PSPA 	<p>KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)</p> <p>KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)</p> <p>KEGIATAN 2891: Biro Umum (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)</p>

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Arah Kebijakan (5)	Strategi (6)	Program (7)	Kegiatan (8)
			<p>1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu</p> <p>2. Meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>), Indikator sasaran : 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha</p>	<p>e) Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi berbasis kompetensi.</p> <p>f) Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja</p> <p>g) Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja</p>	<p>k) Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif;</p> <p>l) Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM;</p> <p>m) Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru</p> <p>n) Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran</p>		

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>), Indikator sasaran : 3.1. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS. 3.2. Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. 3.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS. 3.4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS. 3.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.</p>	<p>h) Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan</p>	<p>) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan</p>		

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>4. Meningkatkan kualitas manajemen Sumber Daya Manusia BPS Indikator sasaran : 4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I</p> <p>5. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Indikator sasaran : 5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. 5.2. Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota yang berpredikat WBK/WBBM</p>				

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan payung hukum bagi BPS dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan perstatistikan serta pengaturan organisasi BPS. Setiap regulasi yang menjadi acuan BPS Pusat akan menjadi acuan hukum bagi BPS di daerah.

Kerangka regulasi yang digunakan BPS dalam menjalankan peran dan fungsinya terbagi dalam 2 (dua) kategori:

1. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik.

Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik adalah UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Adapun regulasi mengenai struktur organisasi BPS utamanya adalah untuk mendukung penyelenggaraan statistik sebagai amanat UU. BPS memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat.

2. Regulasi mengenai struktur organisasi BPS.

Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS harus mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok:

(1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS

- a. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama.
- b. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- c. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
- d. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah

- e. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPSdi Daerah
- f. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- g. Peraturan Kepala BPS No. 2 tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- h. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/ 07/2001 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS
- i. Peraturan Kepala BPS No.116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana
- j. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.pan/05/2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS

(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik.

Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.

a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Intisari dari regulasi:

- Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,
- Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.

b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Intisari dari regulasi:

- Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus,
- Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
- Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistik,
- Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.

- c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah

Intisari dari regulasi:

- Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral

Dari regulasi-regulasi tersebut, BPS memandang masih ada muatan dalam UU No. 16 Tahun 1997 yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi yang perlu dilakukan dalam perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 30

Pasal 30 dalam UU No. 16 Tahun 1997 menyatakan bahwa seluruh aktivitas survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan dengan BPS. Koordinasi dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei, yang berujung pada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Akan tetapi, belum ada ketentuan secara eksplisit dalam pasal ini yang mengatur tindakan yang dapat dilakukan BPS jika ada instansi pemerintah yang tidak mengikuti kaidah yang telah diatur BPS dalam melakukan kegiatan statistik sektoral.

- Pasal 27

Pasal 27 dalam UU No. 16 Tahun 1997 ini telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pada pasal 38, mengatur terkait denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pasal 27. Akan tetapi pada pelaksanaan lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Partisipasi responden masih relatif rendah dalam aktivitas sensus dan survei BPS. Hal ini mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian kegiatan dan pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari data statistik yang dihasilkan. Kurangnya sosialisasi mengenai UU ini merupakan salah satu penyebab dari rendahnya pemahaman responden tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Selain itu, masih belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden.

Di samping itu, terdapat juga sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan kelembagaan BPS dengan instansi lain yang merupakan dampak dari otonomi daerah dan desentralisasi. Meskipun dalam Keputusan Presiden No. 86 Tahun

2007 menjelaskan tentang peran BPS dalam pembangunan nasional, tetapi belum menjelaskan mengenai peran dari stakeholder lainnya seperti kementerian dan pemerintah daerah.

Dalam Renstra BPS Tahun 2015-2019, BPS pun menjabarkan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan BPS terkait kerangka regulasi statistik, yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk tim penataan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik;
4. Melakukan uji publik terhadap naskah akademis;
5. Penyempurnaan terhadap naskah akademis;
6. Perumusan rancangan undang-undang statistik yang baru;
7. Melakukan uji publik terhadap RUU statistik;
8. Penyempurnaan terhadap RUU statistik;
9. Pengajuan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (K/L) berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dari K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tingginya permintaan masyarakat akan ketersediaan data yang berkualitas dan meningkatnya keterbandingan data secara internasional serta didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendorong BPS untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam rangka menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu serta mengacu pada standar nasional dan internasional, melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi,

dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

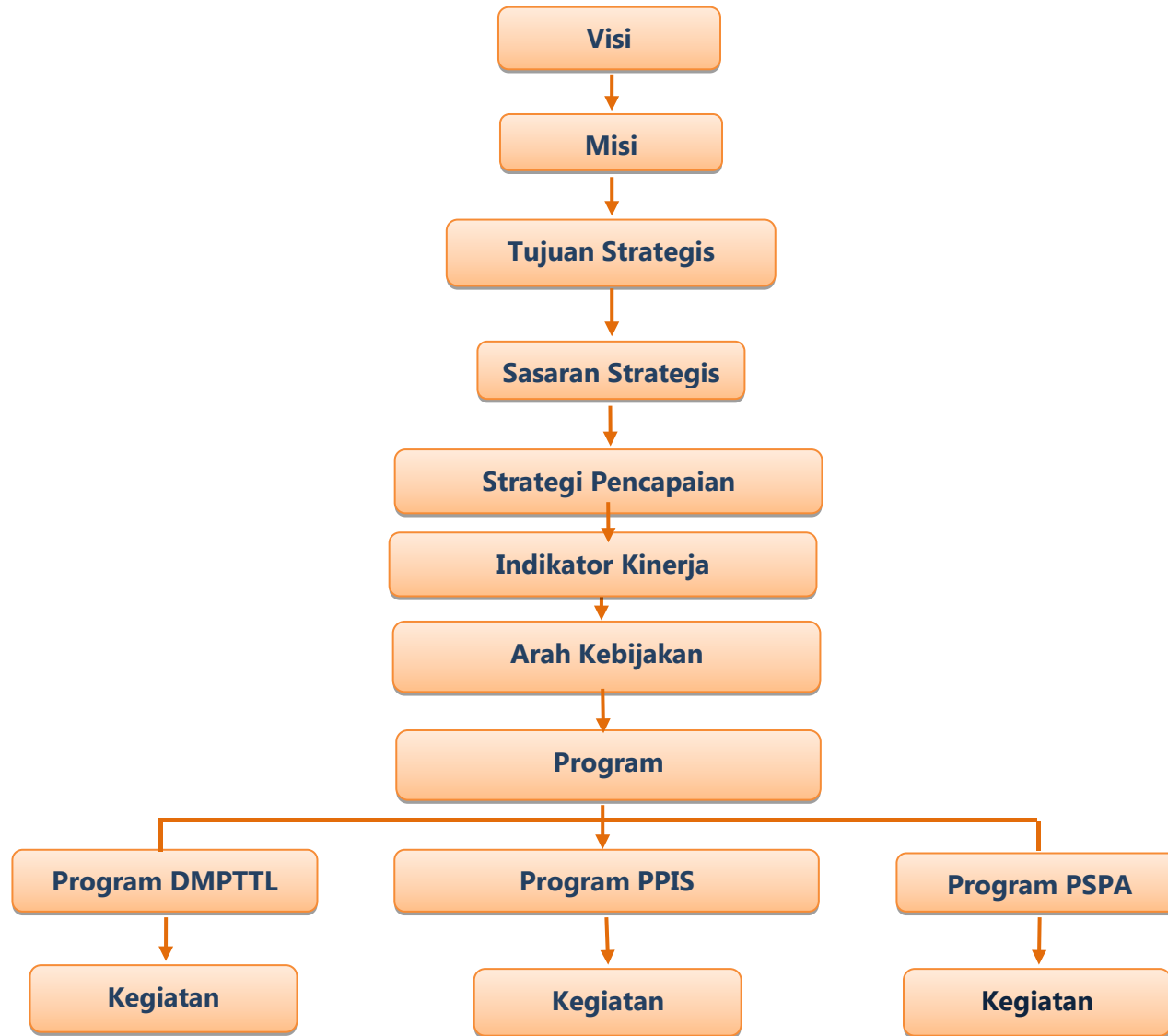
Sebagai upaya BPS dalam melakukan transformasi statistik salah satunya dengan melalui suatu program yang disebut Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics (Statcap-CERDAS). Program tersebut memiliki 4 (empat) tujuan yang terkait dalam rangka pencapaian Visi BPS yaitu antara lain meningkatkan kualitas data, membangun arsitektur TIK yang mendukung tercapainya Visi BPS, meningkatkan kualitas SDM melalui penataan sistem manajemen SDM yang lebih baik dan berbasis kompetensi, serta pengelolaan kelembagaan untuk mendukung lancarnya program Statcap-CERDAS mencapai BPS masa depan.

BPS perlu berupaya dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal dan meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi statistik. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, tetapi juga pada perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data yang berkualitas. Seluruh unit kerja BPS hingga instansi vertikal di daerah harus turut terlibat dan mendukung upaya BPS tersebut.

3.6. Konstruksi dan Siklus Perubahan Rencana Strategis BPS Provinsi Jawa Timur

Untuk lebih memahami hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, arah kebijakan, strategi pencapaian, program dan kegiatan digambarkan dalam ilustrasi gambar 1. Setelah ditetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja dalam Renstra, maka perlu dibuat rancangan arah kebijakan dan strategi dalam mencapai sasaran strategis. Kebijakan tersebut seiring dengan tersedianya anggaran pada 3 (tiga) program kegiatan:

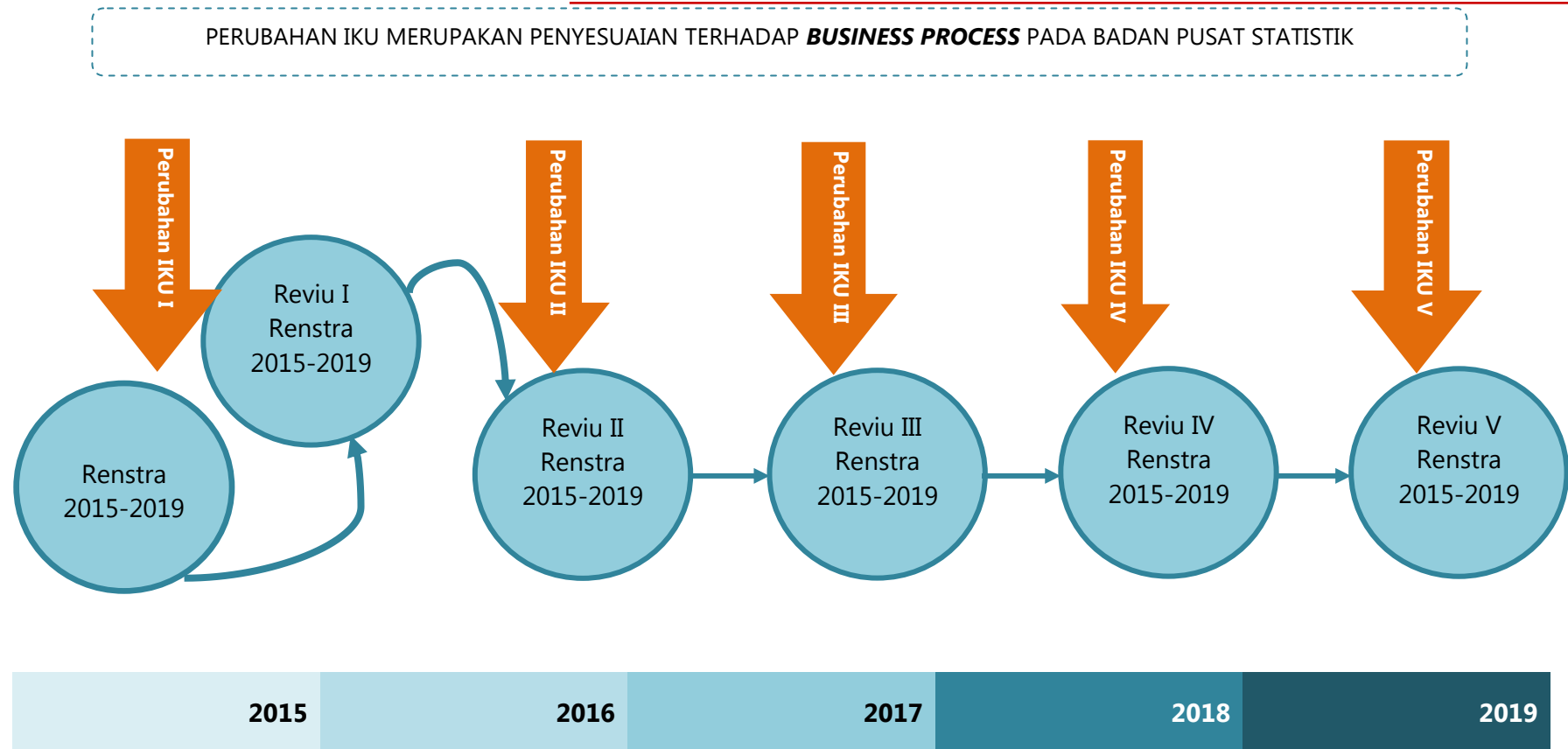
Gambar 1. KONSTRUKSI DAN SIKLUS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI JAWA TIMUR



Gambar 2. JADWAL REVIU RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI JAWA TIMUR 2015-2019

2015	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni			Sep	Okt	Nov	Des
	Penyusunan Renstra 2015-2019, IKU dan Matriks Rencana Kinerja						Reviu Renstra I				
2016	Jan	Feb	Mar					Sep	Sep	Nov	Des
	Reviu Renstra I dan IKU								Reviu Renstra II		
2017	Jan	Feb	Mar					Sep	Okt	Nov	Des
	Reviu Renstra II dan IKU								Reviu Renstra III		
2018	Jan	Feb	Mar					Sep	Okt	Nov	Des
	Reviu Renstra III dan IKU								Reviu Renstra IV		
2019	Jan	Feb	Mar					Sep	Okt	Nov	Des
	Reviu Renstra IV dan IKU								Reviu Renstra V		

Gambar 3. SIKLUS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI JAWA TIMUR 2015-2019



Dokumen Renstra 2015-2019 ini bersifat tidak statis, tetapi dinamis. Renstra lima tahunan merupakan Rencana Jangka Panjang Menengah yang dapat berubah atau disesuaikan dengan perubahan proses bisnis BPS. Sedangkan rancangan waktu perubahan/reviu Renstra dapat dilihat pada gambar 3.

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Jawa Timur

4.1 Target Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yang biasa disebut indikator kinerja. Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja suatu organisasi perlu ditentukan target tertentu sebagai tolok ukur yang digunakan dalam pengukuran kinerja suatu organisasi. Tanpa adanya target, kinerja suatu organisasi tidak mungkin diketahui.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur Periode 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) BPS Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.1. Peningkatan kualitas data statistik	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	84 %
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	70 %
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100 %
		IKSS 1.4. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	53
		IKSS 1.5. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	27
		IKSS 1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	2
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)	IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	98,04 %
		IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	95,45 %
		IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	98,72 %
	T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	IKSS 3.1. Persentase Kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS
IKSS 3.2. Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan			16.57%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
		Nasional	
		IKSS 3.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	120.000
		IKSS 3.4. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	70%
		IKSS 3.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	70%
T.3. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	100%
		IKSS 4.2. Persentase Pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strats I	70%
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	IKSS 5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	50
		IKSS 5.2. Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota yang berpredikat WBK/WBBM	1

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPS Provinsi Jawa Timur akan menjalankan program teknis BPS yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) untuk kegiatan PPIS BPS Provinsi yang merupakan dekosentrasi dari kegiatan teknis unit Eselon II BPS Pusat. Untuk dapat melaksanakan program teknis BPS dengan optimal, didukung dengan pelaksanaan program generik. BPS Provinsi Jawa Timur melaksanakan dua dari tiga program generik BPS yakni Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA), masing-masing untuk kegiatan DMPTTL BPS Provinsi dan PSPA BPS Provinsi.

Selain itu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2015–2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur untuk periode 2015-2019 mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan BPS Pusat serta disesuaikan dengan kondisi di daerah.

4.2. Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Jawa Timur

Kerangka pendanaan adalah kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai rencana strategis yang meliputi sumber pendanaan dari APBN (pemerintah) maupun dari luar APBN (Non-APBN). Kerangka pendanaan ini merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk

mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Alokasi Anggaran 2015-2019 Menurut Program

(Juta Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. ALOKASI PROGRAM Teknis					
I. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	36.358,33	30.052,97	36.611,23	29.916,77	33.048,62
- Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	36.358,33	30.052,97	36.611,23	29.916,77	33.048,62
B. ALOKASI PROGRAM Generik					
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	14.566,16	14.847,22	14.402,35	11.768,84	13.000,87
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	14.566,16	14.847,22	14.402,35	11.768,84	13.000,87
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	5.065,48	1.136,52	5.088,15	4.157,77	4.593,03
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	5.065,48	1.136,52	5.088,15	4.157,77	4.593,03
Total	55.989,96	46.036,71	56.101,73	45.843,39	50.642,52

BAB V

Penutup

Renstra BPS Provinsi Jawa Timur periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas.

Dalam Renstra BPS Provinsi Jawa Timur 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 dan 2

Lampiran 1 – Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2 – Pendanaan per Kegiatan

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kementrian/Lembaga : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur							55,96	46,03	56,21	45,93	50,74	267,74
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS											1. Bidang Statistik Sosial 2. Bidang Statistik produksi 3. Bidang Statistik Distribu 4. Bidang Nerwilis 5. Bidang IPDS 6. Bagian Tata Usaha
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS	84%	85%	84%	84%	84%						
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	65%	80%	70%	70%	70%						
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.4. Jumlah publikasi/ laporan statistik yang terbit tepat waktu	44	46	53	52	53						
	1.5. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	27	27	27	27	27						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1.6. Jumlah publikasi/ laporan sensus yang terbit tepat waktu	9	2	1	2	2						
	SS.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)											
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	98,42%	98,94%	98,04%	98,04%	98,04%						
	2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	86,37%	94,83%	94,20%	94,83%	95,45%						
	2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non	96,46%	99,76%	98,72%	98,72%	98,72%						
	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	3.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	84%	85%	85%	85%	85%						
	3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000						
	3.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	70%	80%	80%	80%	80%						
	3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65%	77%	77%	77%	77%						
	3.5. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	-	16.75%	17.75%	18%	18.75%						
	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	15.38%	18%	18%	18%	18%						
	4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	70%	70%	70%	70%	70%						
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS											
	5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	50	70	70	70	70						
	5.2. Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota yang berpredikat WBK/WBBM	-	1	1	1	1						
Program 06: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)							36,36	30,06	36,61	29,92	33,05	174,39
KEGIATAN 2895 : BPS Provinsi (Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi)												
	Jumlah Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei											Bidang IPDS
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah dokumen updating peta	6.723	1.000	0	0	130.000						
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik											
	Jumlah laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei kebutuhan data	100%	100%	100%	100%	100%						Bidang Statistik Sosial
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan											
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	6	5	5	6	6						
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	4	5	5	5	5						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei ketenagakerjaan dan kependudukan dengan pendekatan rumah tangga	100%	98%	100%	100%	100%						
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk											
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu	0	0	0	1	1						
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	1	1	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Penduduk Antar Sensus	100%	0%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	5	5	5	5	5						
	Jumlah Publikasi /Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	3	5	5	5	5						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga	100%	98,93%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	2	2	2	3	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	100%	98.02%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	100%	82.35%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa											
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat Waktu	0	0	0	1	0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Pendataan Potensi Desa	0	0	0	100%	0						
	Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial											
	Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100%	0	0	100%	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											Bidang Statistik Produksi
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	12	2	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN	2	1	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura,	96.67%	99.21%	96.67%	96.67%	96.67%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga											
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha	0	84.86%	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	96.17%	100%	96.15%	96.15%	96.15%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan Pendekatan rumah tangga	96.49%	100%	96.67%	96.67%	96.67%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Peternakan, Perikanan, dan	89.51%	96.60%	89.51%	89.51%	89.51%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Kehutanan dengan Pendekatan usaha											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Perternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan Pendekatan non rumah tangga non usaha	96.15%	94.59%	96.15%	96.15%	96.15%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu	8	8	12	14	16						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN	3	4	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha	89.35%	89.74%	89.35%	89.35%	89.35%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit	3	2	2	2	2						Bidang Statistik Distribusi

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan usaha	99.47%	90.47%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan rumah tangga non usaha	100%	96.30%	100%	100%	100%						
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016											
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu	0	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016	83.98%	0	100%	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	6	5	8	6	6						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei Statistik Harga dengan pendekatan rumah tangga	96.26%	100%	98.99%	98.99%	98.99%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei Statistik Harga dengan pendekatan usaha	87.95%	100%	90%	95%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)											
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu	0	0	1	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)	0	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	3	1	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN	0	0	0	0	0						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha	89.01%	93.80%	94.74%	94.74%	94.74%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	96.39%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi											Bidang Nerwilis
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei Neraca Produksi dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran											
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2						
	Persentase Pemasukan dokumen (response rate) survei	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Neraca Pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga											
	Persentase Pemasukan dokumen (response rate) survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan usaha	100%	96.76%	100%	100%	100%						
	Persentase Pemasukan dokumen (response rate) survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	0%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik											
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang terbit tepat waktu	3	2	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistic yang memiliki ISSN/ISBN	3	2	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistic dengan pendekatan rumah tangga	90%	97.22%	90%	90%	90%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha	90%	85.33%	90%	90%	90%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS							14,57	14,85	14,40	11,77	13,00	68,61
Kegiatan 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)												
	Layanan Perkantoran											Bagian Tata Usaha
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	18	28	18	18	18						
	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi baik	80%	100%	87%	88%	90%						
	Persentase Sarana dan Prasarana lainnya dalam kondisi baik	80%	100%	87%	88%	90%						
PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							5,07	1,14	5,09	4,16	4,60	24,26
Kegiatan 2891 : Biro Umum (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)												
	Jumlah Pengadaan kendaraan Bermotor											Bagian Tata Usaha
	Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang di selesaikan	100%	0%	100%	100%	100%						
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahdata dan komunikasi											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Pengadaan kebutuhan peralatan dan fasilitas											
	Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah pengadaan kebutuhan gedung dan bangunan yang memadai											
	Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						

Lampiran 2. Pendanaan per Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PROGRAM TEKNIS (PPIS) BPS Provinsi Jawa Timur	36.358,32	30.052,97	36.611,23	29.916,77	33.048,62
B.	PROGRAM GENERIK (DMPTTL dan PSPA) BPS Provinsi Jawa Timur	19.631,64	15.963,75	19.490,50	15.926,61	17.593,89
I.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya	14.566,16	14.847,22	14.402,35	11.768,84	13.000,87
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	5.065,48	1.136,53	5.088,15	4.157,77	4.593,03



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR